RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KATA PENGANTAR

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Diskominfo Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang serta usulan dari berbagai pihak.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tenga ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terima kasih.

Barabai, Juli 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

DARKUNI, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19730131 200501 1 007

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
A. LatarBelakang	.....	1
B. Landasan Hukum	.....	2
C. Maksud dan Tujuan	.....	3
D. Sistematika Penyusunan	.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	.....	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD.	.....	5
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	.....	20
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	.....	24
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	24
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	.....	31
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	31
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	.....	32
C. Program dan Kegiatan	.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	.....	36
BAB V PENUTUP	.....	67

BAB.I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2.

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuat menyusun dokumen perencanaan untuk periode satu tahun ke depan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagai turunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan misi dan visi Bupati dituangkan melalui program-program kegiatan setiap tahun anggaran melalui penjaringan aspirasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja SKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk singkruonisasi sasaran, Isu Strategis, arah kebijakan, yang dituangkan dalam PPAS, KUA di Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan direalisasikan melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Agar penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan program kegiatan berjalan lancar serta memenuhi target pencapaian sasaran diperlukan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan. Untuk itulah dibuat Rencana Kerja (Renja) skpd Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2025.

Secara umum Rencana Kerja Tahun 2025 memuat kebijakan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan kegiatan pendukungnya yang dibiayai dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Uraian Renja Tahun 2025 ini juga menggambarkan secara singkat Pencapaian Kinerja Tahun sebelumnya, masalah dan tantangan yang dihadapi serta Prediksi Tujuan, Sasaran Program Kegiatan Tahun 2025 berdasarkan isu-isu strategis, arah kebijakan serta rumusan-rumusan prioritas pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada kebijakan baik tingkat pusat, provinsi, dan penjabaran visi misi bupati terpilih periode 2021 - 2026

Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

a. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan, sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
b. Mendesak dan penting untuk dilaksanakan.
c. Merupakan tugas dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.3. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu sungai tengah 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 514);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Maksud

   Maksud dari penulisan ini adalah :

   a. Sebagai Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD Tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya.
   b. Untuk menuangkan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan.
   c. Sebagai dasar penilaian kinerja.
2. Tujuan
   a. Tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten
   b. Tercapainya visi dan misi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
   c. Tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu sungai tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Mkasud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
E. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023 dan target akhir tahun renstra dapat di lihat pada tabel II.1 di bawah.

Dalam tabel tersebut dapat tergambarkan bahwa :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% % Capaian Renstra
1	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarkan	70	70	100	200
2	Meningkatkan penerapan e-Government	Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov	90	90	100	194,44
3	Meningkatkan pengelolaan Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	100	100	100	200
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangan	100	100	100	200

5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan urusan KOMINFO	Nilai SAKIP	81,34	80,65	99,15	94,88
		Persentasi penyerapan anggaran	80,10	87,36	109,06	97,06

Berikut ini evaluasi terhadap hasil renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023:

Tabel II.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode Pelaksanaan 2023

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16
2.16	**Meningkatnya pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Indeks SPBE**	**indeks**	**2.9**		**2.68**		**2.9**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.68**	**2.68**		**5.36**		**184.83**		
	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan		Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarkan	%	70		70.00		70		15.00	30.00	50.00	70.00	70.00		140.00		200.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**		**Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)**	**%**	**60**		**60.00**		**60**		**3.00**	**15.00**	**30.00**	**50.00**	**50.00**		**50.00**		**83.33**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase Peningkatan media penyebaran Informasi dan komunikasi**	**%**	**70**		**70.00**		**70**		**65.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**		**70.00**		**100.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**

2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	6		50.00		6		1.00	3.00	5.00	6.00	6.00		6.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	konten	40		40.00		40		4.00	15.00	26.00	40.00	40.00		40.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	3		3.00		3		0.00	1.00	3.00	3.00	3.00		3.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	3		3.00		3		1.00	2.00	3.00	3.00	3.00		3.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media		Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	4		4.00		4		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		4.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika

2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	dokumen	2		2.00		2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	orang	15		15.00		15		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		4.00		26.67		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	4		2.00		4		0.00	0.00	2.00	4.00	4.00		4.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
										Rata rata kinerja (%)							81,00		81,00		
														Predikat Kinerja			Tinggi		Tinggi		

	Meningkatkan penerapan e-Government	Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov	%	90		85.00		90		10.00	20.00	30.00	90.00	90.00		175.00		194.44		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Presentase Aplikasi yang terintegrasi**	**%**	**58**		**48.00**		**58**		**58.00**	**58.00**	**58.00**	**58.00**	**58.00**		**58.00**		**100.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi**	**%**	**57**		**46.00**		**57**		**57.00**	**57.00**	**57.00**	**57.00**	**57.00**		**57.00**		**100.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16

2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	21		17.00		21		18.00	19.00	20.00	21.00	21.00		21.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02	Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi	%	90		90.00		90		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		90.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1		1.00		1		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		1.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	1		1.00		1		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab

					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	dokumen	4		4.00		4		1.00	2.00	3.00	4.00	4.00		4.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	8		8.00		8		2.00	4.00	6.00	8.00	8.00		8.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	4		4.00		4		0.00	0.00	2.00	4.00	4.00		4.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
										Rata rata kinerja (%)							100,00		100,00		
														Predikat Kinerja			Sangat tinggi		Sangat tinggi		
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Presentase Aplikasi yang terintegrasi	%	58		48.00		58		58.00	58.00	58.00	58.00	58.00		58.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi	%	57		46.00		57		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00		57.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	21		17.00		21		18.00	19.00	20.00	21.00	21.00		21.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02	Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi	%	90		90.00		90		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		90.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1		1.00		1		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		1.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	1		1.00		1		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	dokumen	4		4.00		4		1.00	2.00	3.00	4.00	4.00		4.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	8		8.00		8		2.00	4.00	6.00	8.00	8.00		8.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	4		4.00		4		0.00	0.00	2.00	4.00	4.00		4.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
										Rata rata kinerja (%)							100,00		100,00		
														Predikat Kinerja			Sangat tinggi		Sangat tinggi		
2.20	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan		Persentase PD memanfaatkan data untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan	%	100		100.00		100		0.00	0.00	50.00	100.00	100.00		200.00		200.00		

	Meningkatkan pengelolaan Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	%	100		100.00		100		0.00	15.00	30.00	100.00	100.00		200.00		200.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase data sektoral yang terbaharui**	**%**	**100**		**100.00**		**100**		**0.00**	**15.00**	**30.00**	**100.00**	**100.00**		**100.00**		**100.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase kelengkapan data sektoral**	**%**	**100**		**100.00**		**100**		**0.00**	**20.00**	**40.00**	**100.00**	**100.00**		**100.00**		**100.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2.20.02.2.01.01	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**		**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**	**dokumen**	**2**		**2.00**		**2**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**		**2.00**		**100.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**

2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	17		18.00		17		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00		17.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	17		17.00		17		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00		17.00		100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
									Rata rata kinerja (%)							100,00		100,00		
									Predikat Kinerja							Sangat tinggi		Sangat tinggi		

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16
2.21	Meningkatnya pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		Indeks KAMI	indeks	314		258.00		314		0.00	0.00	0.00	258.00	258.00		516.00		164.33		

	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangan	%	100		100.00		100		25.00	40.00	75.00	100.00	100.00		200.00		200.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase perangkat daerah menerapkan Keamanan Informasi**	**%**	**13.9**		**11.10**		**13.9**		**0.00**	**5.00**	**10.00**	**12.00**	**12.00**		**12.00**		**86.33**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD**	**%**	**39**		**25.00**		**39**		**0.00**	**15.00**	**15.00**	**39.00**	**39.00**		**39.00**		**100.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2.21.02.2.01.03	**Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**	**dokumen**	**12**		**1.00**		**12**		**0.00**	**3.00**	**9.00**	**12.00**	**12.00**		**12.00**		**100.00**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran / Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14		15		16

	Rata rata kinerja (%)							95,44		95,44		
Predikat Kinerja								Sangat tinggi		Sangat tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kepedulian pemerintah daerah terhadap program prioritas untuk Mempercepat peningkatan kualitas Pengelolaan Media Komunikasi Publik												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: penambahan Sumber daya manusia dan pengadaan sarana prasarana												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya ***)** :												

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, yaitu : ***"Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)"*** secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran :
a. Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan
b. Meningkatnya penerapan e-Government

Tujuan 2 : Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan, dengan sasaran :
Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sasaran :
Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian

Tujuan 4 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional, dengan sasaran :
Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo

Adapun pencapaian kinerja secara keseluruhan tahun sebelumnya dan proyeksi kinerja tahun berjalan Dinas komunikasi dan informatika tergambar dalam tabel II.2 dibawah ini

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+2)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023(thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	-	-	60	65	70	70	80	60	50	70	70	
2	Presentase pemanfaatan saluran komunikasi dan informasi oleh masyarakat	-	-	70%	75%	80%	80%	90%	70%	70%	80%	80%	
3	Persentase data sektoral yang terbaharui	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase kelengkapan data sektoral	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Presentase Aplikasi yang terintegrasi	-	-	48%	58%	68%	68%	88%	48%	58%	68%	70%	

6	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi	-	-	46%	57%	68%	84%	100%	46%	57%	68%	70%	
7	Presentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	
8	Persentase perangkat daerah menerapkan Keamanan Informasi	-	-	8.3%	11.1%	13.9%	16,%	19,4%	8%	12%	13.9%	14,2%	
9	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	-	-	11%	25%	39%	53%	67%	11%	39%	39%	41%	
10	Persentase penunjang urusan Sekretariat berjalan sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Pegawai PD yang dilayani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	70%	70%	70%	
17	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

18	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 20*f*, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara kuantitatif menunjukkan angka yang cukup baik. Walupun demikian secara kualitatif masih harus dilakukan pencermatan penilaian yang cukup mendalam. Hal ini perlu untuk dilakukan dalam rangka memberikan jawaban terhadap perkembangan informasi yang ada saat ini.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerag tergambar dalam Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan komunikasi, informasi publik dan kualitas data statistic di Kab. HST
2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan TIK, E-Government dan Persandian Kab. HST
3. Peningkatan kapasitas aparatur diskominfo yang terlatih dan terampil di bidang TIK, Komunikasi dan Informasi Publik
4. Peningkatan pemanfaatan TIK sektor ekonomi dan bisnis.
5. Mewujudkan masyarakat cerdas digital.
6. Reformasi Birokrasi Diskominfo

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, salah satunya bidang ekonomi ditekanna pada pengembangan sentra pertanian, perikanan, pariwisata, IKM/UMKM potensial.

Untuk mendukung sasaran pembangunan tersebut salah satunya diperlukan peningkatan infrastruktur TIK berupa pemenuhan akses internet maupun seluler yang juga menjadi salah satu target kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Analisis kebutuhan Perangkat Daerah untuk mendukung hal tersebut, seperti tertera dalam tabel II.4 di bawah ini

Tabel II.4
Rumusan kebutuhan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025
hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	HST	**Persentase penunjang urusan Sekretariat berjalan sesuai standar**	**100%**	**2.532.755.876**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	16.269.400	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.709.800	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	8.559.600	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	1.816.629.626	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12orang /bulan	1.816.629.626	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	64.944.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	31 paket	64.944.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9.990.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	54.954.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	274.913.850	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	5.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	25.624.950	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.396.900	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1584 dok	8.892.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	205.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	0	

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	218.608.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.314.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	113.160.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.134.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	141.391.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	89.816.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	12.910.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	39.020.000	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		***Persentase Masyarakat yang mengakses informasi***	**80**	**2.296.399.400**	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase media yang digunakan	80%	2.296.399.400	
Relasi Media		*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	2 Laporan	365.903.000	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	2 Komunitas	5.490.000	
Pelayanan Informasi Publik		*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	2 Permohonan	104.269.000	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	2 rekomendasi	274.888.000	
Diseminasi Informasi		*Persentase khalayak yang terpapar informasi publik*	50 Persentase	1.115.132.400	

Pengelolaan Media Komunikasi Publik		*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	8 Media	334.185.000	
Penyusunan Konten		*Jumlah Konten Informasi Publik*	24 Konten	23.460.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	3 Orang	73.072.000	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		nilai tata kelola e-government	**2**	**5.341.525.727**	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	68%	42.866.000	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	42.866.000	
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi	100%	5.298.639.727	
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		*Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional*	3 aplikasi	69.720.000	
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		*Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda*	1 laporan	315.273.300	
Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		*Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan*	2 Dokumen	19.295.000	
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah*	2 Aplikasi	248.525.000	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	2 Aplikasi	29.179.000	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	36 Perangkat Daerah	123.385.298	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo*	3 Dokumen	65.123.000	
Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		*Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan*	5 Aplikasi	61.374.000	

Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		*Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*	36 Perangkat Daerah	4.366.765.129	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Indeks Pembangunan StaƟsƟk Sektoral	**2,6**	**379.011.000**	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data sektoral yang dipublikasikan	**100%**	379.011.000	
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*	37 Orang	195.812.000	
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		*Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan*	100 Persentase	98.287.000	
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		*Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu*	80 Persentase	32.912.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata*	10 Dokumen	40.000.000	
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		*Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik*	10 Dokumen	12.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks KAMI	348	**359.904.800,**	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot		Persentase tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	39 Persentase	341.504.800	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*	4 dokumen	51.470.000	
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	1 Laporan	45.730.000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	1 Laporan	83.486.000,	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	36 Perangkat Daerah	160.818.800	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase peningkatan perangkat daerah yang melakukan tata kelola persandian*	100 %	18.400.000	

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi*	36 Perangkat Daerah	18.400.000	
TOTAL				**10.909.596.803**	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika didiskusikan dalam pembahasanforum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrembang SKPD Kabupaten dan Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan Program dan Kegiatan oleh para pemangku kepentingan tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aing Bantai, BAT (telepon satelit)	-	-	

BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi Kebijakan Nasional dan provinsi untuk tahun 2024 seperti dalam taebl III.1 di bawah ini :

Tabel III.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
1	Akselerasi Reformasi Birokrasi Melalui Transformasi Digital	Instruksi Presiden tentang Percepat Transformasi Digital, Senin, 3 Agustus 2020	5 Langkah Percepat Transformasi Digital 1. Perluasan Akses dan Peningkatan Infrastruktur Digital dan Penyediaan Layanan Internet 2. Roadmap Transformasi Digital di sektor-sektor Strategis (Pemerintahan, Layanan Publik, Bantuan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Industri, maupun Penyiaran) 3. Integrasi Pusat Data Nasional 4. SDM Talenta Digital 5. Regulasi, Skema Pendanaan dan Pembiayaan
B	Provinsi		
1	Target Capaian Kinerja Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan	Renja Diskominfo Prov Kalsel	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : 3,2 2. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Lengkap dan Akurat : 85% 3. Rata-rata Indeks Keamanan Informasi (KAMI) : 290 4. Persentase Wilayah Bebas Blankspot : 93%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tabel dibawah ini menggambarkan Tujuan, Sasaran serta target yang ingin dicapai pada tahun 2024

Tabel III. 2

Tujuan dan Indikator Tujuan disertai Target Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengelolaan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks SPBE	2,94
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional	Indeks RB	70,5

Sasaran dan Indikator Sasaran disertai Target Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	90%
2	Meningkatnya penerapan e Government	Presentase Peningkatan Indeks SPBE	6,8%
3	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	nilai sakip Diskominfo persentase penyerapan anggaran	- 84 - 87%

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatnya pengelolaan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan daera	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik
		Meningkatnya penerapan e Government
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional aran, akuntabel dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 tergambar dalam tabel III.3 di bawah ini :

Tabel III.3

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel. IV

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**10.909.596.803,00**							**1.511.734.953.613,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.909.596.803,00**							**1.511.734.953.613,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**10.170.681.003,00**							**1.510.364.953.613,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan sekretariat berjalan sesuai standart*** ***Persentase pelanggaran disiplin kepegawaian YANG DITINDAKLANJUTI***	**100 %**			**100 %** **100 %**	**2.532.755.876,00**						**100 %**	**2.796.539.693,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.269.400,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Hulu Sungai Tengah	-	18.045.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7.709.800,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Hulu Sungai Tengah		8.536.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	8.559.600,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Hulu Sungai Tengah		9.509.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu*	-			100 %	1.816.629.626,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	1.986.583.443,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.816.629.626,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		1.986.583.443,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai PD yang dilayani*	-			100 %	64.944.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	-	-	70.989.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	9.990.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	-		10.989.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	54.954.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	

											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar*	-			100 %	274.913.850,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	275.007.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.624.950,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		30.207.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.396.900,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		11.349.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1584 Dokumen	8.892.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		9.336.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		21.390.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	205.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		197.224.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi*	-			100 %	0,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kan. Hulu Sungai Tengah	-	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kan. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia*	-			100 %	218.608.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	242.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.314.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		4.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	113.160.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		137.660.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENSTRA OPD	TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.134.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		100.134.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia*	-			100 %	141.391.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	-	-	143.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	89.461.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	-		88.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	12.910.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	-		13.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	39.020.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	-		42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarkan***	-			**100 %**	**2.296.399.400,00**						-	**1.501.776.413.920,00**	

	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*% Frekwensi penyebaran informasi Publik* *% Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik* *Persentase Peningkatan Media informasi digital yang digunakan* *Persentase Peningkatan Media informasi non digital yang digunakan* *PPID Pembantu yang telah menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku*	-			100 % 100 % 100 % 100 % undefined undefined	2.296.399.400,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	1.501.776.413.920,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	365.903.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas	5.490.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		6.039.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				0 Laporan	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				2 Permohonan	104.269.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		1.237.281.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				50 Persentase	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				2 Rekomendasi	274.888.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		216.205.220,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENSTRA OPD	TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				50 Persentase	1.115.132.400,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		1.500.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				8 Media	334.185.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.703.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				24 Konten	23.460.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		25.806.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				3 Orang	73.072.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		80.379.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Presentase Peningkatan kematangan Indeks SPBE***	**-**			**100 %**	**5.341.525.727,00**						**-**	**5.792.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase perangkat tatakelola yang terpenuhi* *Presentase SDM terpenuhi* *Presentase regulasi terpenuhi* *Presentase Infrasruktur Egov yang terpenuhi*	-			100 % 100 % 100 % 100 %	42.886.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														

			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	42.886.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Infrasruktur Egov yang terpenuhi* *Presentase SDM terpenuhi* *Presentase regulasi terpenuhi*	-			100 % 100 % 100 %	5.298.639.727,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	5.770.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														

			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerinteh Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				3 Aplikasi	69.720.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis														
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				1 Dokumen	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	315.273.300,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENSTRA OPD	TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				2 Dokumen	19.295.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				0 Dokumen	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				4 Aplikasi	248.525.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	29.179.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				36 Dokumen	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														

			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				36 unit	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				36 Perangkat Daerah	123.385.298,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Barabai, Benawa Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														

			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				5 Layanan	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				4 Dokumen	65.123.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Program	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	0,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				5 Aplikasi	61.374.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENSTRA OPD	TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				36 Perangkat Daerah	4.366.765.129,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		4.250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**379.011.000,00**							**850.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase PD memanfaatkan data Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah***	**100 %**			**100 % 100 %**	**379.011.000,00**						**100 %**	**850.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan data sektoral Persentase peningkatan data sektoral yang dipublikasikan*	-			100 % 100 %	379.011.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				37 Orang	195.812.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	98.287.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														

			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				80 Persentase	32.912.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				10 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**359.904.800,00**							**520.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persentase pengamanan sistem elektronik dan Informasi Indeks KAMI***	**419 point**			**100 % 382 point**	**359.904.800,00**						**419 point**	**520.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perangkat daerah menerapkan Keamanan Informasi Persentase peningkatan informasi layanan sistem elektronik yang telah diamankan*	-			54 % 100 %	341.504.800,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	470.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				4 Dokumen	51.470.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	45.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	83.486.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				36 Perangkat Daerah	160.818.800,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan perangkat daerah yang melakukan tata kelola persandian*	-			100 %	18.400.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				36 Perangkat Daerah	18.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF	Kab. Hulu Sungai Tengah		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	JUMLAH							**10.909.596.803,00**							**1.511.734.953.613,00**	

BAB. V
PENUTUP

Rencana Kerja Perngkat Daerah Dinas Komuniksi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 ini masih merupkan draf awal renja, sehingga perbaikan di sana sini masih sangat diperlukan. isadari bahwa pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat tergantung kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi/konsultasi yang lebih baik akan mampu mengoptimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan informatika dalam mendukung visi, misi Pimpinan Daerah.

Barabai, Juli 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

DARKUNI, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19730131 200501 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengan Kec. Barabai
Telp. (0517) 3790845 Fax (0517) 3790281
E-mail : diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id
B A R A B A I KODE POS 71351

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 050 / ١١٥ / DISKOMINFO / TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

1 Bahwa untuk memberikan gambaran rencana kerja untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 akan disusun Rencana Kerja menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, untuk itu perlu membentuk TIM Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dins
2 Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4010);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
3 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Nomor 4815);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang PercepatanPenanggulangan Kemiskinan;

12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;

13 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Nomor 4815);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang PercepatanPenanggulangan Kemiskinan;

12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;

13 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15 eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Keuangan Daerah;

18 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

19 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

20 Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Terhadap Tim Penyusun RENJA Tahun 2025, dimaksud pada diktum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Diskominfo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 19 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

DARKUNI, S.Hut
NIP. 19730131 200501 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO
HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 050 /11 b /DISKOMINFO/2024
TANGGAL : 19 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Diskominfo	Ketua
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kabid Informatika & Persandian	Anggota
4	Kabid Komunikasi & informasi Publik	Anggota
5	Kasubbag Keuangan	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

DARKUNI, S.Hut
NIP. 19730131 200501 1 007

Tabel T-C 19

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan

Pencaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kalimatan Selatan / Hulu Sunga Tengah

Nama Peranngkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan PD dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan PD tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingakat Relisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan/SubKegiatan Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10 (5+7+9)	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN									
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Dokumen Anggaran, penatausahaan, dan laporan keuangan tepat waktu	100	100.00.00	100	25.00.00	25	100	25.00.00	25
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang selesai	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
		Persentase pelanggaran disiplin kepegawaian YANG DITINDAKLANJUTI	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
		Persentase Administrasi BMD yang lengkap dan sesuai	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
		Persentase Temuan Pemeriksaan/audit YANG DITINDAKLANJUTI	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
		Persentase pegawai yang berkinerja baik	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100.00.00	100	75.00.00	75	100	75.00.00	75
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	04.00	4	02.00	50	4	50.00.00	50
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	03.00	3	02.00	66,67	3	66.67	66,67
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100.00.00	100	100.00.00	100	100	100.00.00	100
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	19.00	17	12.00	70,59	20	60.00.00	60
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	20	19.00	13	00.00	0	20	00.00	0
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100	100.00.00	100	25.00.00	25	100	25.00.00	25

2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	08.00	2	02.00	100	8	25.00.00	25
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	02.00	3	03.00	100	5	60.00.00	60
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	03.00	3	03.00	100	5	60.00.00	60
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	1584	1584.00.00	1584	792.00.00	50	1584	50.00.00	50
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	2	02.00	2	02.00	100	2	100.00.00	100
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21	20.00	21	14.00	66,67	21	66.67	66,67
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	70	70.00.00	70	00.00	0	70	00.00	0
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	02.00	2	00.00	0	2	00.00	0
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	02.00	2	02.00	100	2	100.00.00	100
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	03.00	3	03.00	100	3	100.00.00	100
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12.00	12	06.00	50	12	50.00.00	50
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	100.00.00	100	30.00.00	30	100	30.00.00	30
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	06.00	6	02.00	33,33	6	33.33.00	33,33
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	22.00	22	11.00	50	22	50.00.00	50
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	02.00	2	00.00	0	2	00.00	0
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang mengakses informasi	80	70.00.00	80	80.00.00	100	80	187.50.00	100
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Media yang digunakan	80	70.00.00	80	40.00.00	50	80	50.00.00	50
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	70	60.00.00	6	03.00	50	70	04.29	4,29
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	70	60.00.00	50	25.00.00	50	70	35.71	35,71
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	02.00	2	01.00	50	2	50.00.00	50

2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3	03.00	3	01.00	33,33	3	33.33.00	33,33
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4	04.00	4	04.00	100	4	100.00.00	100
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3	03.00	2	00.00	0	3	00.00	0
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	25	20.00	25	00.00	0	25	00.00	0
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	02.00	2	00.00	0	2	00.00	0
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	nilai tata kelola e-government	2	0,104166667	2	00.00	0	2	50.00.00	0
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	68	57.00.00	80	80.00.00	100	68	117.65	117,65
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25	21.00	2	01.00	50	25	04.00	4
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Infrastruktur Egov yang terpenuhi	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36	36.00.00	1	00.00	0	36	00.00	0
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	01.00	1	01.00	100	1	100.00.00	100
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	36	36.00.00	1	01.00	100	36	0,1375	2,78
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8	08.00	8	08.00	100	8	100.00.00	100
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	05.00	4	02.00	50	6	33.33.00	33,33
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Dokumen Anggaran, penatausahaan, dan laporan keuangan tepat waktu	100	100.00.00	100	25.00.00	25	100	25.00.00	25
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang selesai	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
		Persentase pelanggaran disiplin kepegawaian YANG DITINDAKLANJUTI	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
		Persentase Administrasi BMD yang lengkap dan sesuai	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50

		Persentase Temuan Pemeriksaan/audit YANG DITINDAKLANJUTI	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50	
		Persentase pegawai yang berkinerja baik	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100.00.00	100	75.00.00	75	100	75.00.00	75	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	04.00	4	02.00	50	4	50.00.00	50	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	03.00	3	02.00	66,67	3	66.67	66,67	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100.00.00	100	100.00.00	100	100	100.00.00	100	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	19.00	17	12.00	70,59	20	60.00.00	60	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	20	19.00	13	00.00	0	20	00.00	0	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100	100.00.00	100	25.00.00	25	100	25.00.00	25	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	08.00	2	02.00	100	8	25.00.00	25	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	02.00	3	03.00	100	5	60.00.00	60	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	03.00	3	03.00	100	5	60.00.00	60	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	1584	1584.00.00	1584	792.00.00	50	1584	50.00.00	50	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	2	02.00	2	02.00	100	2	100.00.00	100	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21	20.00	21	14.00	66,67	21	66.67	66,67	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	70	70.00.00	70	00.00	0	70	00.00	0	
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	02.00	2	00.00	0	2	00.00	0	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	02.00	2	02.00	100	2	100.00.00	100	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	03.00	3	03.00	100	3	100.00.00	100	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12.00	12	06.00	50	12	50.00.00	50	

2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	100.00.00	100	30.00.00	30	100	30.00.00	30
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	06.00	6	02.00	33,33	6	33.33.00	33,33
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	22.00	22	11.00	50	22	50.00.00	50
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	02.00	2	00.00	0	2	00.00	0
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang mengakses informasi	80	70.00.00	80	80.00.00	100	80	187.50.00	100
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Media yang digunakan	80	70.00.00	80	40.00.00	50	80	50.00.00	50
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	70	60.00.00	6	03.00	50	70	04.29	4,29
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	70	60.00.00	50	25.00.00	50	70	35.71	35,71
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	02.00	2	01.00	50	2	50.00.00	50
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3	03.00	3	01.00	33,33	3	33.33.00	33,33
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4	04.00	4	04.00	100	4	100.00.00	100
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3	03.00	2	00.00	0	3	00.00	0
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	25	20.00	25	00.00	0	25	00.00	0
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	02.00	2	00.00	0	2	00.00	0
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	nilai tata kelola e-government	2	0,104166667	2	00.00	0	2	50.00.00	0
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	68	57.00.00	80	80.00.00	100	68	117.65	117,65
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25	21.00	2	01.00	50	25	04.00	4
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Infrastruktur Egov yang terpenuhi	100	100.00.00	100	50.00.00	50	100	50.00.00	50
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36	36.00.00	1	00.00	0	36	00.00	0
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	01.00	1	01.00	100	1	100.00.00	100

2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	36	36.00.00	1	01.00	100	36	0,1375	2,78
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8	08.00	8	08.00	100	8	100.00.00	100
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	05.00	4	02.00	50	6	33.33.00	33,33
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	3	00.00	02.06	00.00	0	3	00.00	0
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100	100.00.00	100	15.00	15	100	15.00	15
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	2	02.00	2	00.00	0	2	00.00	0
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	18	17.00	19	00.00	0	18	00.00	0
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	18	17.00	19	00.00	0	18	00.00	0
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	3	00.00	02.06	00.00	0	3	00.00	0
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100	100.00.00	100	15.00	15	100	15.00	15
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	2	02.00	2	00.00	0	2	00.00	0
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	18	17.00	19	00.00	0	18	00.00	0
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	18	17.00	19	00.00	0	18	00.00	0
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Indeks KAMI	348	314.00.00	348	00.00	0	348	00.00	0
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Persentase tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	39	25.00.00	80	80.00.00	100	39	205.13.00	205,13
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	16	12.00	1	00.00	0	16	00.00	0
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									

02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Indeks KAMI	348	314.00.00	348	00.00	0	348	00.00	0
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Persentase tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	39	25.00.00	80	80.00.00	100	39	205.13.00	205,13
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	16	12.00	1	00.00	0	16	00.00	0